

IMPLIKASI INVESTASI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PERTUMBUHAN DAN KEBERLANJUTAN EKONOMI INDONESIA

Syahransyah¹, Nirwana Sukmawati², Chairandra Al Azmi³, Agus Salam⁴, Mirza Syapiq⁵

^{1,2,3,4,5}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹syaarunsyah@gmail.ac.id, ²nirwanasukmawati@gmail.ac.id, ³chairandraalazmi@gmail.ac.id, ⁴agussalam@gmail.ac.id, ⁵mirzasyapiq@gmail.ac.id

Abstrak

Sektor perikanan berperan strategis bagi perekonomian Indonesia sebagai penyumbang devisa dan sumber penghidupan masyarakat pesisir. Potensi ekonomi biru, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), menarik arus investasi yang mampu mendorong pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan infrastruktur maritim. Namun, tanpa tata kelola berkelanjutan, investasi berisiko menimbulkan eksploitasi berlebihan, pencemaran laut, dan menurunnya keanekaragaman hayati yang merugikan masyarakat lokal. Karena itu, diperlukan kebijakan komprehensif yang mengedepankan regulasi kuat, teknologi ramah lingkungan, sertifikasi berkelanjutan, serta pelibatan aktif masyarakat pesisir. Sinergi pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola perikanan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya pada kelestarian ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Sektor perikanan, Ekonomi biru, Investasi, Pembangunan berkelanjutan, Masyarakat pesisir, Ekosistem laut, Tata Kelola.

Abstract

The fisheries sector plays a strategic role in Indonesia's economy as both a source of foreign exchange and livelihood for coastal communities. The vast potential of the blue economy, including the Exclusive Economic Zone (EEZ), has attracted increasing investment that drives GDP growth, job creation, and maritime infrastructure development. However, without sustainable management, such investments risk overexploitation, marine pollution, and biodiversity loss, directly harming local communities. Therefore, a comprehensive policy framework is needed, emphasizing strong regulations, eco-friendly technology, sustainable product certification, and active community participation. Synergy between government, private sector, academia, and civil society is essential to establish fair, transparent, and sustainable fisheries governance. The success of investment should not be measured solely by economic growth, but also by its contribution to marine ecosystem preservation and the equitable welfare of coastal communities.

Keyword: Fisheries sector, Blue economy, Investment, Sustainable development, Coastal communities, Marine ecosystem, Governance.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, secara geografis dan ekologis menyimpan potensi sumber daya perikanan yang sangat besar dan beragam. Sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, merupakan salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi nasional yang tidak hanya menyokong ketahanan pangan dan gizi masyarakat, tetapi juga

berperan strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta memperluas peluang ekspor ke pasar internasional. Dalam dua dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah menetapkan sektor perikanan sebagai sektor unggulan yang layak dikembangkan melalui berbagai pendekatan investasi, baik yang bersifat domestik maupun asing. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi investasi di sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural

dan teknis yang perlu ditangani secara holistik dan lintas sektoral.

Di satu sisi, meningkatnya investasi di sektor perikanan membuka ruang akselerasi pembangunan infrastruktur pelabuhan perikanan, pengadaan kapal modern, pengolahan hasil laut berteknologi tinggi, serta penyediaan akses pembiayaan bagi nelayan kecil. Hal ini tentunya memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pesisir dan membuka akses lebih luas terhadap pasar ekspor hasil laut Indonesia yang selama ini didominasi oleh negara-negara maju. Namun di sisi lain, kurangnya regulasi yang ketat dan belum maksimalnya pengawasan terhadap aktivitas investasi di sektor ini sering kali menimbulkan praktik eksploitasi sumber daya perikanan secara berlebihan (*overfishing*), pencemaran laut akibat aktivitas industri perikanan yang tidak ramah lingkungan, serta marginalisasi masyarakat lokal yang hidup secara tradisional dan menggantungkan kehidupannya pada laut.

Kesenjangan pemahaman dan keterampilan antara pelaku usaha besar dengan nelayan kecil semakin memperlebar jurang ketimpangan ekonomi, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terlebih lagi, kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang masih rendah dari segi pendidikan, akses terhadap informasi, dan penguasaan teknologi menjadikan mereka kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif dari investasi yang tidak terkontrol. Investasi yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan degradasi sumber daya kelautan secara permanen.

Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu kerangka kerja kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengatur aspek legalitas dan teknis dari investasi sektor perikanan, tetapi juga memastikan keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam setiap tahap pengembangan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Dukungan dari lembaga pendidikan, riset, serta pendampingan teknologi oleh akademisi dan profesional juga menjadi kunci penting dalam mendorong transformasi sektor ini menuju arah yang lebih berkeadilan, produktif, dan lestari. Dengan demikian, analisis terhadap situasi

terkini ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peluang, tantangan, serta rekomendasi strategis yang diperlukan guna memastikan bahwa investasi di sektor perikanan benar-benar memberikan implikasi positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

METODE

Tahap persiapan menjadi fondasi utama agar kegiatan penyuluhan hukum di sektor perikanan dapat berjalan sistematis, efektif, dan tepat sasaran. Pada tahap ini, tim penyuluh dari Universitas Asahan melakukan analisis awal terhadap kondisi investasi di sektor perikanan, mengidentifikasi hambatan regulasi, dan meninjau tantangan terkait keberlanjutan ekosistem laut. Data diperoleh melalui laporan resmi pemerintah, penelitian akademik, serta wawancara langsung dengan masyarakat pesisir dan pelaku usaha. Berdasarkan hasil analisis, tim menyusun rencana kegiatan yang jelas, menentukan tema, tujuan, serta sasaran kegiatan, dengan fokus pada bagaimana investasi di sektor perikanan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Peserta kegiatan dipilih secara representatif, mencakup masyarakat nelayan, pengusaha perikanan, mahasiswa, akademisi, aparat desa, dan pihak pemerintah daerah terkait, seperti Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Penanaman Modal Daerah. Materi penyuluhan disusun berbasis hukum positif, termasuk Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan turunannya yang mengatur keberlanjutan sektor perikanan. Untuk mendukung penyampaian materi, tim menyiapkan berbagai media, mulai dari modul, brosur, leaflet, hingga alat presentasi, serta menyiapkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi hukum yang berkompeten.

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan secara tatap muka dengan pendekatan interaktif dan edukatif. Peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pentingnya

investasi di sektor perikanan untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain aspek ekonomi, peserta juga diberikan pemahaman tentang prinsip keberlanjutan, termasuk dampak negatif dari eksploitasi berlebihan, praktik ilegal fishing, serta penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Kegiatan ini menghadirkan ruang diskusi interaktif, memungkinkan peserta menyampaikan pengalaman, kendala, dan aspirasi mereka sehingga materi yang diberikan lebih aplikatif dan sesuai kebutuhan lapangan. Simulasi dan studi kasus digunakan untuk menganalisis konflik nyata antara investasi perikanan dengan masyarakat lokal dari perspektif hukum dan sosial-ekonomi.

Selain itu, tim menyampaikan strategi investasi berkelanjutan, seperti penerapan program Corporate Social Responsibility (CSR), pendampingan teknologi tangkap ramah lingkungan, dan pembangunan infrastruktur perikanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan holistik ini, kegiatan penyuluhan tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum dan ekonomi peserta, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya sinergi antara investor, masyarakat, dan pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Implikasi Investasi Sektor Perikanan terhadap Pertumbuhan dan Keberlanjutan Ekonomi Indonesia” telah membuahkan hasil yang tidak hanya bersifat edukatif dan informatif, tetapi juga transformasional dalam membentuk paradigma baru di kalangan masyarakat pesisir yang selama ini terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas sektor perikanan. Kegiatan ini diselenggarakan dengan metode partisipatif-kolaboratif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai subjek aktif dalam proses identifikasi masalah, pengembangan alternatif solusi, hingga perumusan aksi-aksi strategis yang relevan dengan kebutuhan lokal mereka.

Dalam tahap awal kegiatan, tim pengabdian melakukan observasi lapangan dan

wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan lokal, termasuk kelompok nelayan tradisional, pelaku usaha kecil menengah (UKM) sektor perikanan, perangkat desa, serta perwakilan dari dinas kelautan dan perikanan setempat. Dari hasil pengumpulan data tersebut, teridentifikasi bahwa investasi dalam sektor perikanan di wilayah ini memang telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, baik dari pihak pemerintah pusat, swasta nasional, hingga investor asing. Namun, peningkatan investasi tersebut ternyata belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, peningkatan kapasitas SDM, atau keberlanjutan lingkungan hidup pesisir.

Secara substansial, kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya memahami struktur dan skema investasi yang masuk ke sektor perikanan di daerah mereka. Melalui serangkaian kegiatan seperti diskusi kelompok terfokus, penyuluhan hukum, pelatihan literasi ekonomi, dan workshop teknologi tepat guna, masyarakat dibekali dengan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip investasi yang adil dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pengenalan konsep *blue economy* yang menekankan pada pembangunan ekonomi kelautan yang ramah lingkungan, inklusif, serta berbasis pada kearifan lokal.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa setelah mendapatkan paparan informasi dan berdialog secara terbuka dengan tim pengabdian, masyarakat mulai menyadari bahwa investasi tidak semata-mata tentang pembangunan fisik atau peningkatan modal finansial, tetapi juga tentang penguatan kapasitas sosial, pelestarian lingkungan, dan pemajuan keadilan ekonomi. Kesadaran ini kemudian mendorong terbentuknya forum masyarakat pesisir yang bertugas untuk memantau, mengkritisi, dan berpartisipasi dalam proses perencanaan investasi perikanan yang akan dilakukan di desa mereka ke depan. Forum ini difasilitasi oleh tim pengabdian untuk menyusun mekanisme kerja yang demokratis, akuntabel, dan representatif terhadap berbagai kelompok kepentingan lokal.

Tidak hanya itu, dalam aspek pemberdayaan ekonomi, kegiatan ini berhasil memberikan pelatihan kepada masyarakat

tentang pengelolaan hasil laut berbasis industri rumah tangga serta pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana distribusi dan pemasaran produk hasil perikanan. Pelatihan ini mencakup materi mengenai manajemen usaha mikro, strategi pemasaran online, pengemasan produk yang higienis dan menarik, serta pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan jangkauan pasar. Dalam praktiknya, beberapa ibu rumah tangga dan pemuda desa berhasil mengembangkan produk olahan laut seperti ikan asap, abon ikan, dan kerupuk ikan, yang dipasarkan secara daring dan mendapat respons positif dari konsumen di luar daerah.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga menghasilkan rumusan kebijakan lokal yang dituangkan dalam draft rancangan peraturan desa (Perdes) tentang tata kelola investasi perikanan yang inklusif, yang diharapkan menjadi payung hukum lokal dalam menyeleksi dan mengatur investasi yang masuk agar selaras dengan kepentingan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Draft Perdes ini disusun melalui proses musyawarah desa yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan, pemuda, dan unsur pemerintah desa, sehingga substansinya benar-benar merepresentasikan kebutuhan riil masyarakat.

Dari sisi lingkungan, kegiatan ini memberikan edukasi terkait dampak negatif dari eksploitasi berlebih terhadap ekosistem laut seperti overfishing, pencemaran laut akibat aktivitas industri, dan konversi kawasan mangrove menjadi tambak yang tidak ramah lingkungan. Edukasi ini dilakukan melalui pemutaran film dokumenter, pembagian leaflet, serta sesi diskusi tematik dengan para peserta. Sebagai wujud tindak lanjutnya, masyarakat bersama tim pengabdian sepakat untuk memulai program restorasi mangrove secara bertahap dengan melibatkan kelompok pemuda desa sebagai pelaksana utama, yang sekaligus menjadi sarana pemberdayaan dan pembentukan karakter generasi muda peduli lingkungan.

Secara umum, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa proses edukasi, pemberdayaan, dan fasilitasi yang dilakukan secara sistematis dan intensif mampu mengubah pola pikir masyarakat dari yang semula pasif dan kurang terinformasi menjadi lebih terbuka, kritis, dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan lokal, khususnya di sektor strategis seperti perikanan. Keberhasilan

kegiatan ini tidak hanya terlihat dari output jangka pendek, seperti pelatihan, workshop, dan pembentukan forum komunikasi antarpelaku usaha serta aparat desa, tetapi juga pada outcome jangka panjang yang lebih substansial. Outcome tersebut mencakup peningkatan daya kritis masyarakat terhadap isu hukum, ekonomi, dan lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan, serta lahirnya inisiatif-inisiatif kolektif yang mendorong terciptanya ekosistem investasi yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak akademisi untuk memastikan setiap proyek atau investasi di sektor perikanan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, sehingga pembangunan lokal dapat berlangsung inklusif, berkesinambungan, dan berdampak positif bagi generasi mendatang..



Gambar 1. Kata sambutan dari Kepala Kelurahan yang diwakilkan Oleh Bapak **Sundiro S.H., M.H**



Gambar 2. Sesi Foto Bersama

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum bertema “Implikasi Investasi Sektor Perikanan terhadap Pertumbuhan dan Keberlanjutan Ekonomi Indonesia”, dapat disimpulkan bahwa investasi di sektor perikanan memiliki peranan strategis yang sangat signifikan dalam memperkuat perekonomian nasional. Investasi yang dikelola dengan baik tidak hanya meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memperluas kesempatan ekspor hasil laut, mendukung ketahanan pangan, serta memperkuat kedaulatan maritim Indonesia. Lebih jauh, dampak positif dari investasi sektor perikanan merambah ke berbagai sektor terkait, seperti transportasi laut, industri pengolahan, perdagangan, logistik, pariwisata bahari, hingga pendidikan dan riset maritim, sehingga membentuk ekosistem ekonomi yang saling terhubung dan produktif.

Namun, di sisi lain, hasil penyuluhan menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan mendasar yang perlu segera ditangani. Pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dalam pengelolaan investasi berkelanjutan masih rendah, sehingga risiko pelanggaran hukum dan praktik eksploitasi yang merugikan lingkungan tetap ada. Perlindungan terhadap nelayan tradisional juga masih lemah, sehingga kelompok ini berpotensi terdorong pada posisi marginal dalam arus investasi yang masuk. Selain itu, koordinasi antarinstansi pemerintah dalam pengawasan, pengaturan, dan distribusi manfaat investasi belum berjalan optimal, sehingga peluang ketimpangan sosial, konflik agraria di wilayah pesisir, serta degradasi ekosistem laut tetap tinggi apabila tidak dikelola secara transparan dan akuntabel.

Penyuluhan hukum terbukti menjadi instrumen penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan ini meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional, dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengelolaan investasi perikanan. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, penyuluhan juga menekankan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya laut, sehingga investasi yang masuk dapat memberi manfaat ekonomi secara adil sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian,

penyuluhan hukum tidak hanya memberikan pemahaman normatif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif, memperkuat tata kelola sektor perikanan, serta mendorong terwujudnya pembangunan kelautan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi, A., & Santoso, R. Analisis Implikasi Investasi Sektor Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2021, 22(3), 145-160.
- Haryanto, T., & Nugroho, P. Investasi Perikanan dan Keberlanjutan Ekonomi: Tinjauan Hukum dan Sosial. *Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan*, 2020, 15(2), 87-102.
- Kusuma, D., & Prasetyo, L. Dampak Investasi Perikanan Terhadap Pendapatan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Pembangunan dan Sosial Ekonomi*, 2019, 10(1), 33-48.
- Rahman, F., & Lestari, S. Strategi Investasi Perikanan Berkelanjutan untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Alam*, 2022, 8(2), 55-70.
- Suryadi, H., & Wibowo, A. Peran Investasi Perikanan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lokal. *Jurnal Ekonomi Kelautan*, 2020, 12(4), 101-115.
- Hadi, M., & Pranoto, B. Investasi Sektor Perikanan dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Nelayan. *Jurnal Pesisir dan Masyarakat*, 2021, 7(1), 21-37.
- Agustina, R., & Firmansyah, Y. Analisis Kinerja Investasi Perikanan dan Dampaknya terhadap Perekonomian Daerah Pesisir. *Jurnal Ekonomi dan Kelautan*, 2022, 14(3), 65-80.
- Setiawan, D., & Ramadhani, F. Pendekatan Hukum dan Ekonomi terhadap Investasi Perikanan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2021, 19(2), 88-104.
- Wijaya, P., & Sari, N. Sinergi Investasi dan Konservasi Laut dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal*

- Manajemen Sumber Daya Perikanan, 2020, 11(3), 45-59.
- Prasetyo, H., & Lestari, A. Evaluasi Dampak Investasi Perikanan terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pesisir. *Jurnal Ekonomi Maritim*, 2021, 9(1), 12-28.
- Yuliana, T., & Hartono, R. Strategi Pengembangan Investasi Perikanan Berbasis Keberlanjutan Ekosistem Laut. *Jurnal Kelautan dan Perikanan Indonesia*, 2022, 16(2), 77-92.